

Peran Masyarakat Sipil dalam Perbaikan Tata Kelola Pertambangan

Maryati Abdullah | Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia
Sosialisasi dan Seminar EITI, Kemenko Perekonomian RI; Novotel-Yogyakarta, 27 Agustus 2015

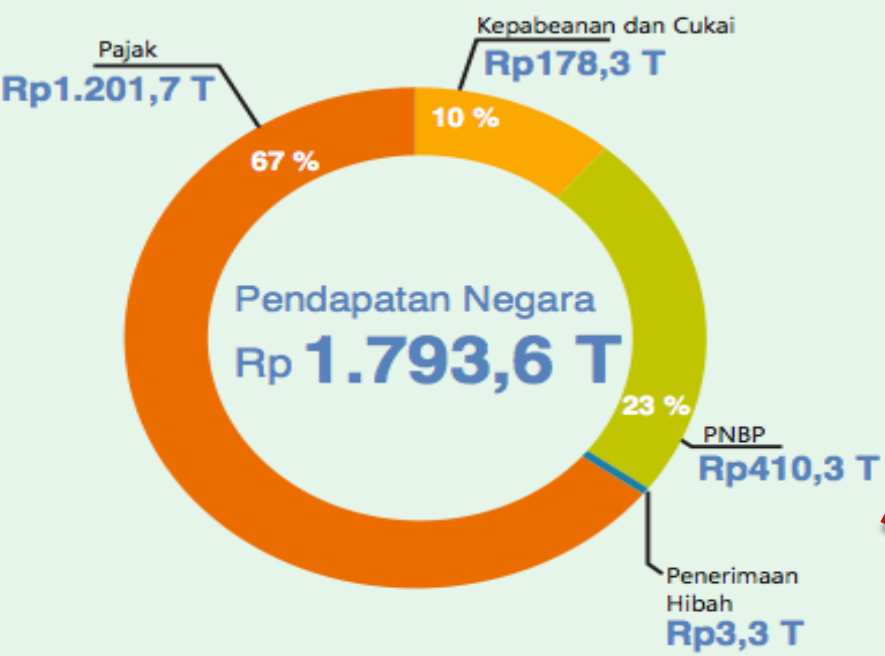
Optimalisasi Penerimaan Negara & Daerah

Peningkatan Nilai Tambah & Hilirisasi

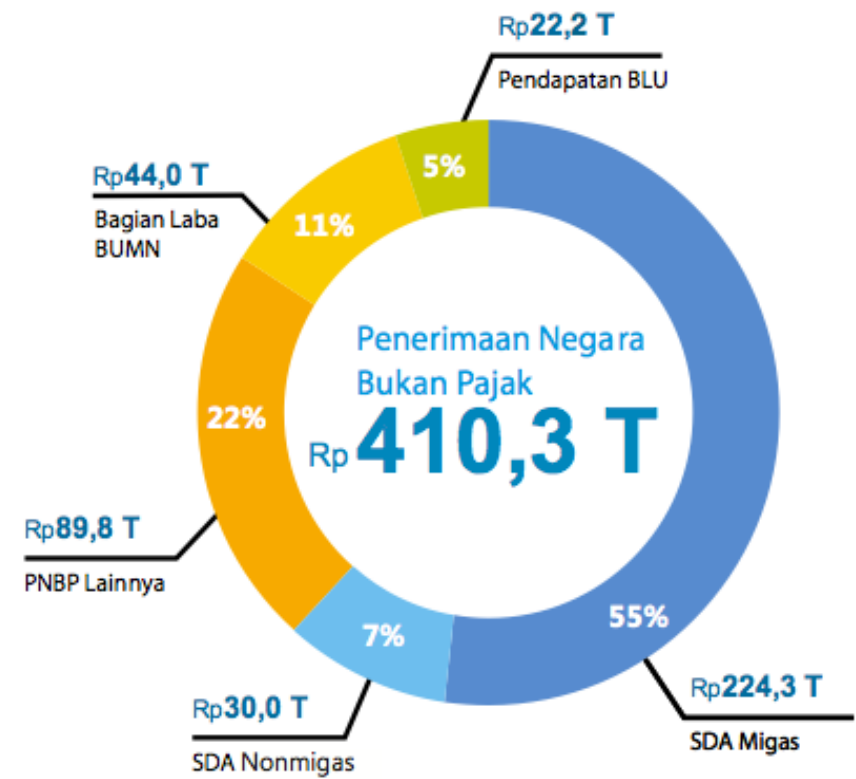
Penciptaan Efek Berganda Ekonomi

Infrastruktur & Efisiensi Ekonomi

PENDAPATAN NEGARA 2015



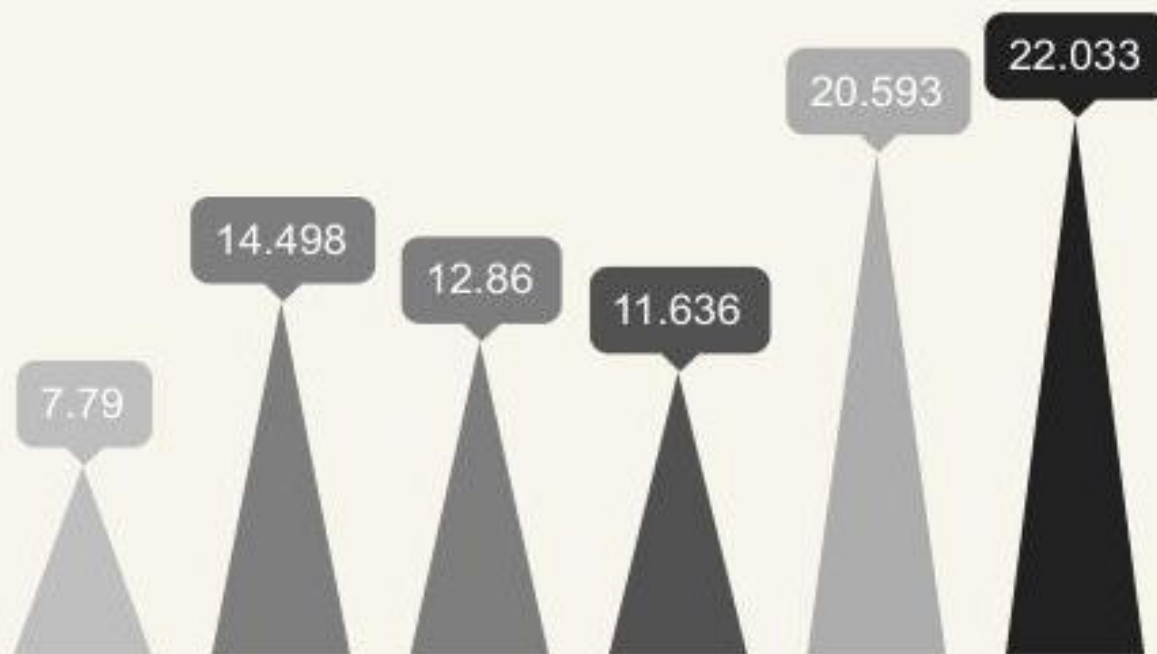
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2015





PNBP SDA 2015 [Triliun Rupiah]

Target PNBPs Minerba dan SDA 2015



[Miliar Rupiah]

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transfer Daerah (DBH SDA Pertambangan Umum)

Transfer ke Daerah – DBH SDA Minerba



MONITORING

- Monitoring Kegiatan Pertambangan
- Korsup KPK-Minerba-Pemda,
[perijinan, peruntukan lahan, penerimaan negara,
pasca-tambang]
- Pelaksanaan CSR di sekitar tambang
[audit sosial, MSG]
- Reklamasi dan pasca-tambang

Advokasi Kebijakan

- Masukan Visi Misi Capres
- Advokasi regulasi [revisi uu migas, pelaksanaan UU, PP, dst..]
- Tata Kelola Lahan dan Hutan ut Minerba
- Mengawal sistem perijinan
- Konsistensi Kebijakan Hilirisasi
- Review R-APBN 2016
- Transisi Blok Mahakam & penyertaan daerah
- efektifitas pelaksanaan UU Otda yang baru

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan

Riset & Pengembangan Kapasitas & Pembelajaran :

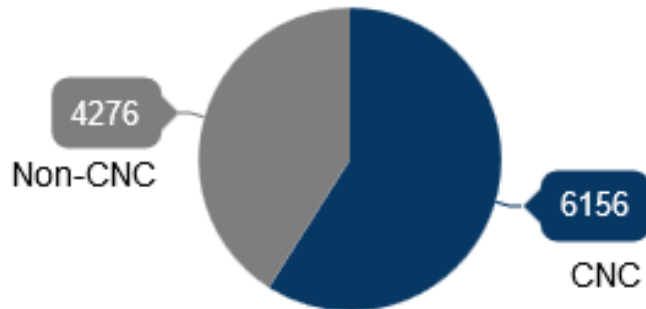
- Riset efektifitas DBH SDA thd Penanggulangan Kemiskinan
- Perhitungan Potential Lost
- Illicit Tax & Revenue
- Kontekstualisasi Data EITI
- Riset Spatial dan Tata Ruang
- Penulisan Pembelajaran Asia Pacific
- Training CSO dalam memahami Tata Kelola dan Dana Bagi Hasil SDA
- Training Open Data
- Workshop Standard Global dalam Good Mining Practices

Terlibat dlm Inisiatif2 Khusus :

- EITI
- OGP
- Open Data
- Menjadi Mitra LAPOR
- Pengembangan portal www.opendataekstraktif.com

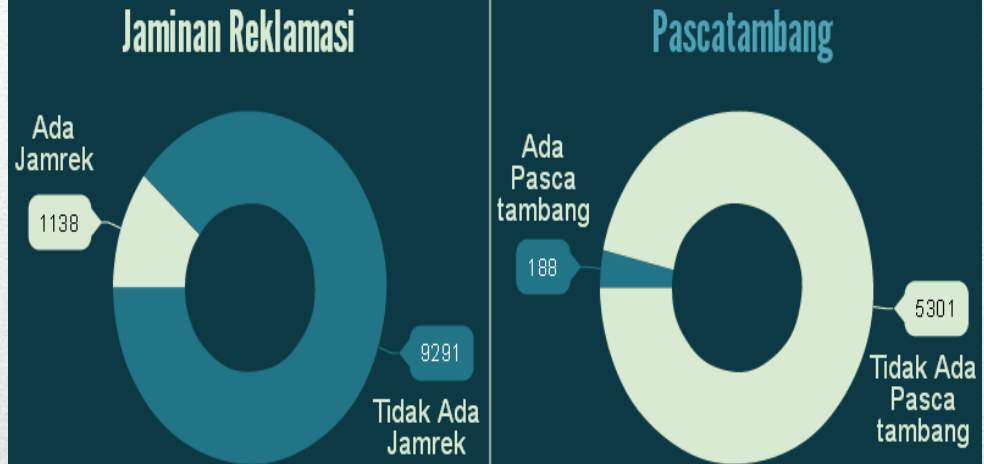
Peran & Agenda CSO

Temuan- Temuan



41% izin pertambangan di Indonesia masih belum penuh sertifikasi CNC

Pemenuhan Kewajiban Jaminan Reklamasi & Pascatambang



PROGRES RENEGOSIASI

STATUS	KK	PKP2B	Jumlah
Sepakat Sebagian MoU	7	12	19
Sepakat dan Tanda tangan MOU	26	61	87
Amandemen kontrak	1	-	1
Total	34*)	73**)	107

Renegosiasi dilakukan untuk mengedepankan **kepentingan nasional (national interest)**

Catatan :

*) Tidak termasuk 4 KK : PT Koba Tin (**sudah Terminasi**), PT Irja Eastern Minerals dan PT Nabire Bakti Mining (**mengajukan Terminasi**) dan PT Paragon Perdana Mining (**diusulkan terminasi**)

**) Tidak 2 PKP2B: PT Batubara Selaras Sapta (permasalahan internal pemegang saham) dan PT Sarwa Sembada Karya Bumi (menunggu tanggapan Perusahaan)

Pengawasan Izin Pertambangan di Indonesia*

Data dalam infografis ini diambil dari data Dirjen Planologi, Kementerian Kehutanan (2014)

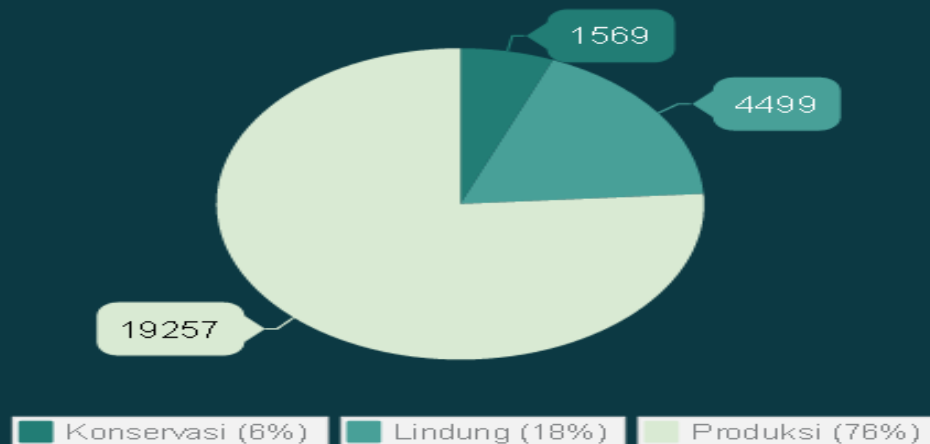
**Penggunaan
Kaw. Hutan**

**Jaminan
Reklamasi**

**Pasca
tambang**

*Infografis ini mencakup 31 provinsi yang menjadi area kerja KorSup Minerba KPK (2014-2015)

Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan



*Dalam ribu hektar (ha)

24%

dari total area
pertambangan terindikasi
berada di hutan
konservasi & lindung

ILEGAL

UU 41/1999: Kegiatan pertambangan
hanya boleh dilakukan di hutan produksi
dan hutan lindung dg melakukan
underground mining

POTENSI KERUGIAN PENERIMAAN MINERBA (LANDRENT) DI 30 PROVINSI

Data dalam infografis ini diambil dari data Dirjen Minerba, ESDM (2014)



Potensi penerimaan land rent (Iuran Tetap) dihitung dari data izin dan luasan yang mengacu pada PP No. 9 /2012. IUP Eksplorasi: Luas Wilayah (ha) x \$2. IUP Operasi: Luas Wilayah (ha) x \$4



Realisasi penerimaan dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sektor pertambangan umum pada komponen land rent (iuran tetap).



Potensi kerugian dihasilkan dari selisih potensi penerimaan dengan realisasinya.



30 Provinsi yang Mengalami Potential Lost

TOTAL POTENSI KERUGIAN LANDRENT DI 30 PROVINSI 2010–2013

RP 1,5 Triliun

Total Potensi Kerugian Land Rent di 31 Provinsi 2010-2013



10 Provinsi dengan Potential Lost Terbesar

RP 266, 25 MILIAR

17 % potensi kerugian berasal dari provinsi

KALIMANTAN TIMUR

KENAPA RUGI?

Pemegang IUP TIDAK/BELUM bayar kewajiban land rent.

Data luasan IUP TIDAK diperbaharui.

Bukti setor bayar land rent TIDAK disampaikan perusahaan kepada pemda, atau dari pemda kepada pusat.

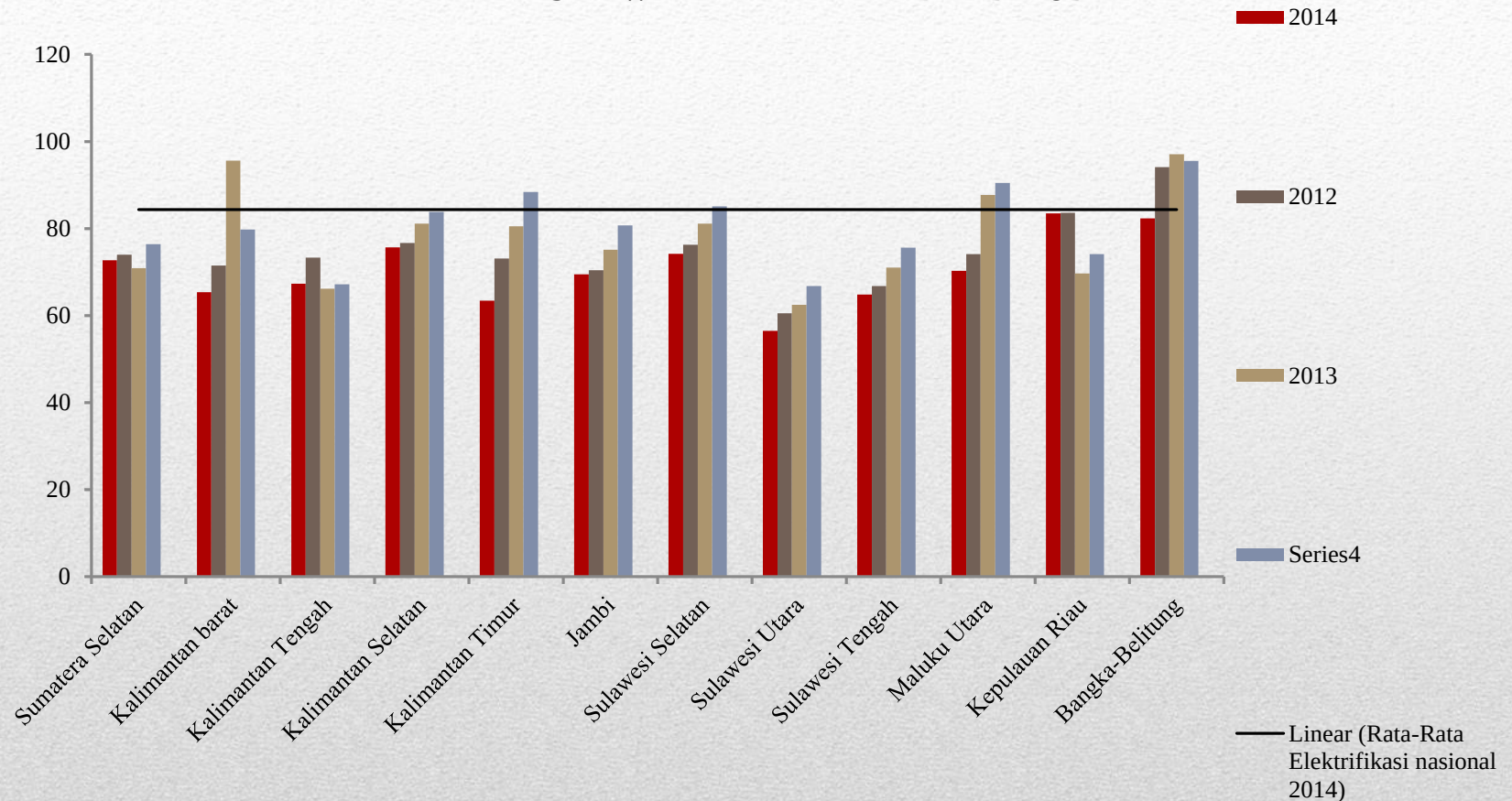
REKOMENDASI

Penertiban dan upaya hukum mendorong kepatuhan pembayaran.

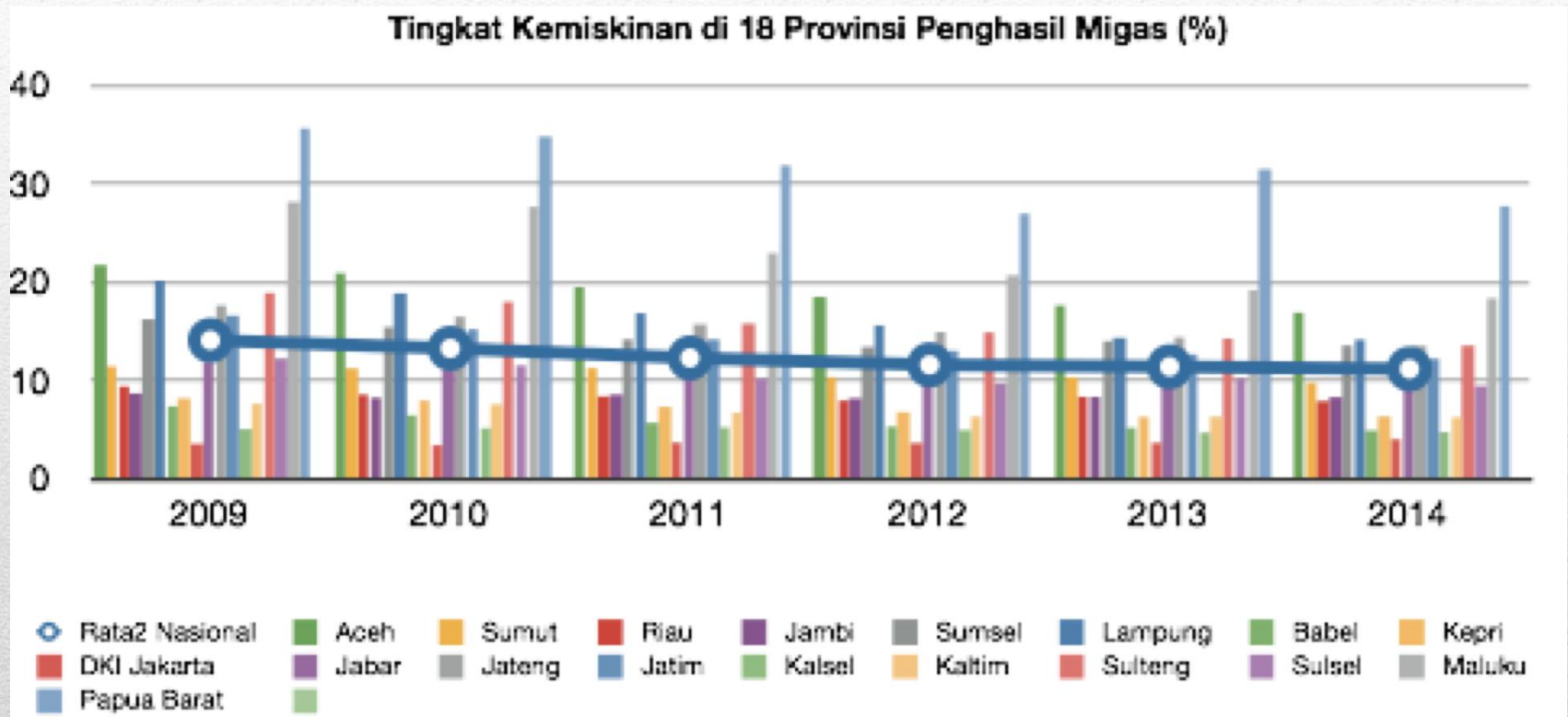
Update dan transparansi data spasial dan luasan area usaha pertambangan.

Perbaikan mekanisme dan transparansi pembayaran land rent.

ELEKTRIFIKASI 12 WILAYAH MINERAL DAN BATUBARA



Akses Listrik di Sektor Minerba



Kemiskinan di Daerah Kaya Migas & Minerba

Terima Kasih
